

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pelayanan Pemkot Harus Diperbaiki

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal. 7

Edisi : Jumat, 13 April 2018

PELAYANAN PEMKOT HARUS DIPERBAIKI

BANDUNG

- Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk sinergikan antara raihan nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan MenPanRB, dengan pelayanan kepada masyarakat.



"Kami, anggota dewan masih sering menerima laporan dari masyarakat, tentang buruknya pelayanan PNS di lingkungan Pemkot Bandung kepada masyarakat," ujar Edi.

Edi mengatakan, hal ini seharusnya tidak terjadi lantaran penilaian SAKIP dari MenPanRB, yang sudah mendapat

predikat A. Diakui Edi, penilaian SAKIP sifatnya hanya penilaian dari laporan administrasi. Karenanya Edi mengaku masih menemui banyak kinerja PNS yang belum maksimal.

"Ya kalau pencatatannya memang sudah baik. Tapi kinerjanya masih banyak yang harus diperbaiki," terang Edi. Edi mencontohkan, kinerja PNS yang sekarang wajib mengisih absen kedatangan dan kepulangan. Secara pencatatan, semua PNS rajin absen pagi dan sore, namun apa ada yang bisa menjadin setelah dan sebelum absen yang bersangkutan bekerja sesuai tupoksi.

"Bukan tidak mungkin, setelah absen pagi mereka pergi ke luar kantor. Lalu pulang lagi ke kantor saat mau absen sore. Sementara siang hari, mereka tidak bekerja," paparnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Edi adalah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Seharusnya, Edi menilai jika SAKIP mendapat nilai A, opini BPK juga bisa mendapat WTP (Wajar Dengan Pengecualian).

"Opini WDP ini membuktikan, bahwa masih ada temuan yang dari kinerja para PNS," tambahnya. Untuk penempatan pejabat Eselon II, Edi juga menilai ada sistem yang kurang baik. Pemkot Bandung sering melelang jabatan untuk Eselon II, padahal sebaiknya jabatan di Eselon II diisi berdasarkan daftar urutan kepangkatan dan jabatan.

"Kalau dengan sistem lelang jabatan, siapa saja bisa lolos, tanpa mempertimbangkan masa pengabdian dan pengalaman, itu kan tidak adil. Toh walaupun ada lelang, pada akhirnya semua bergantung hak preogratif walikota," paparnya. (adv)



Kami, anggota dewan masih sering menerima laporan dari masyarakat, tentang buruknya pelayanan PNS di lingkungan Pemkot Bandung kepada masyarakat."

Edi Haryadi

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung